

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aziz, Rifai Mardin, Widyastuti, dkk. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Maghza Pustaka, 2011

Diva Pitaloka, Satria Prayoga, dan Ninin Ernawati. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. 2024.

Hadin Muhjad, H.M. Prof. Dr. SH., M.Hum. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

Hadi Wijaya, Indra, Deny Aditya Puspasari, Ade Pugara, Bagus Nuari Priambudi, Brian Pradana, dan Nofa Martina Arian. *Buku Ajar Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2022.

Juniarso Ridwan,H., dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2016

Mulyadi, M. Budi, dan Trini Handayani. *Hukum Tata Ruang: Teori, Kebijakan, dan Praktik dalam Pengelolaan Ruang*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.

Pramono,R.Widodo D., dan Ananda Prima Yurista. *Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.

Rukayah, R.Siti. *Pengantar Perancangan Tapak*. Semarang Biro Penerbit Planologi UNDIP, 2020

Sutaryono, Rakhmat Riyadi, dan Susilo Widiyantoro. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang *Bangunan Gedung* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.

C. Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Karya Tulis Lainnya

Adnan, M. A., Sunarto, A., Parhusip, D., & Khair, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 396-400.

Agus, E. (2018). Perencanaan Gerbang Batas Kota Pariaman. *Jurnal Rekayasa*, 8(1), 63-86.

Fauzi, I. A., & K., A. (2023, Desember). Penegakan Hukum Garis Sempadan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. *Jurnal Diskresi*, 2(2), 152–157.

Ghani, R. A. (2025, Juni). *Analisis Garis Sempadan Bangunan pada Perumahan Mutiara Residence 2 Magelang*. Dalam Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur, 314-324.

Hasibuan, R. (2018). *Pengaturan hak atas lingkungan hidup terhadap kesehatan*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 6(2), 93-101.

Herman, A. A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) Gedung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Lasusua. *INTENS Jurnal Inovasi Sains Teknologi dan Bisnis*, 1(1), 9-29.

Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162–176.

Khairi, M. (2017). Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 3(1), 79-102.

Kurniawati, W. O. (2023). Penerapan Penegakan Hukum Bagi yang Melakukan Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan di Kecamatan Lasusua. *Jurnal Vol. 1 No. 2, September 2023*, 1, 97-107.

- Marissa, H. R., & Budhianti, M. I. (2025). Analisis Garis Sempadan Bangunan pada Bangunan Bertingkat: Analysis of Building Boundary Lines in Multi-Storey Buildings. *Reformasi Hukum Trisakti*, 7(3), 1252-1262.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JHIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811.
- Sinabariba,D. (2018). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB) Berbasis Nilai Keadilan. *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*, 9-52.
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96-96.
- Wati,E.P.(2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(1), 119-126.
- Zarkasi,A.(2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 431-488.